LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BBPOM DI YOGYAKARTA TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan Informasi Publik juga berlaku bagi Kementerian/Lembaga.

Keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan memegang peranan strategis dalam mendukung penguatan tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan yaitu pilar pengawasan produsen, pilar pengawasan konsumen dan pilar pengawasan pemerintah. Keterbukaan informasi publik memudahkan pelaku usaha dalam mengakses kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha yang pada akhirnya menciptakan kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan Obat dan Makanan aman. Keterbukaan informasi publik juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sehingga menciptakan masyarakat cerdas yang mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan. Keterbukaan informasi publik medorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, sehingga mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang pada akhirnya menciptakan *good and clean gorvernance* (kepemerintahan yang baik dan bersih) dilingkungan pemerintah, khususnya Badan POM. Salah satu wujud komitmen Badan POM dalam mendorong keterbukaan informasi publik, yaitu berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan Oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahun.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

1. Sebagai bahan pelaporan perkembangan kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BB POM di Yogyakarta
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BB POM di Yogyakarta

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BB POM di Yogyakarta meliputi rincian kegiatan, hasil pelaksanaan dan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebelumnya.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara di BB POM di Yogyakarta berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
4. Peraturan Kepala Badan POM Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik
5. Peraturan Ka Badan POM tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Keputusan Kepala BPOMNomor HK.02.01.1.2.05.21.216 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPOM
8. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.22.221.08.22.45 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik 2022
9. Keputusan Kepala BBPOM di Yogyakarta Nomor HK.06.02.14A.14A4.03.22.118 Tahun 2022 Tentang Pembentukan TIM PPID BBPOM di Yogyakarta

BAB II
GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi barbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi publik untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus mendorong terciptanya clean and good governance karena BBPOM di Yogyakarta diminta untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dikerjakan secara terbuka, transparan dan akuntabel. Menurut jenisnya, informasi keterbukaan publik dibagi menjadi 4 yaitu: 1) informasi yang tersedia setiap saat; 2) informasi yang diumumkan serta merta; 3) informasi yang diumumkan secara berkala; dan 4) Informasi yang dikecualikan. BB POM di Yogyakarta telah melakukan keterbukaan informasi berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM serta Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola PPID di Lingklungan Badan POM.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Yogyakarta, serta untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, Balai Besar POM di Yogyakarta telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik yang dimuat dalam website bb_yogyakarta@pom.go.id. Pemutakhiran data dan informasi tersebut dilakukan baik secara harian, mingguan, bulanan, per enam bulan, maupun tahunan. Sampai dengan Tri Wulan IV Tahun 2023 telah dilakukan beberapa tindak lanjut, yaitu

1. Telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik dalam website BB POM di Yogyakarta www.bbpom-yogya.go.id, dan www.yogyakarta.pom.go.id sebagai berikut:

   Publikasi informasi berupa berita aktual terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi Balai Besar Obat dan Makanan di Yogyakarta yang telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023 sebanyak 1168 (Seribu serratus enam puluh delapan) publikasi informasi Obat dan Makanan baik melalui website dan media sosial BBPOM di Yogyakarta, dengan rincian sebagi berikut:

   1) Media Online sebanyak 89 postingan;
   2) Berita aktual sebanyak 174 berita actual;
   3) Media cetak sebanyak 16 pemberitaan;
   4) Instagram sebanyak 319 postingan;
   5) *Facebook* 286 postingan;
   6) *Twitter* sebanyak 261 postingan; dan
   7) Youtubu sebanya 23 unggahan.
2. Telah diberikan data terkait informasi publik kepada mahasiswa yang telah melakukan penelitian terkait tugas dan fungsi Obat dan Makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 10 (dua) pemohon, dengan rincian sebagai berikut:

NO	BULAN	JUMLAH PERMINTAAN	JUMLAH PEMOHON YANG DIKABULKAN		JUMLAH PEMOHON DITOLAK	ALASAN PERMINTAAN DITOLAK/DIKABULKAN		
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	TIDAK DIKUASAI
1	JANUARI	1	1	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	2	2	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	2	2	0	0	0	0	0
6	JUNI	1	1	0	0	0	0	0
7	JULI	1	1	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	2	2	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER3	1	1	0	0	0	0	0
	JUMLAH	10	10	0	0	0	0	0

DATA PEMOHON INFORMASI TAHUN 2023

NO	NAMA	ALAMAT	INFORMASI YANG DIMINTA	TANGGAL PERMOHONAN
1	[redacted]	[redacted]	Permintaan Data/Informasi terkait tugas akhir Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan tema “perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan kosmetika racikan dokter di DIY	13 Januari 2023
2	[redacted]	[redacted]	Bahan penelitian untuk penyusunan skripsi berjudul Peran Lembaga Ombudsmen DIY dalam melakukan pengawasan terhadap BBPOM Yogyakarta sebagai penyelenggara	1 Februari 2023

NO	NAMA	ALAMAT	INFORMASI YANG DIMINTA	TANGGAL PERMOHONAN
			pelayanan publik dalam Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	
3	[redacted]	[redacted]	Permintaan Data/Informasi terkait tugas akhir Sarjana Terapan jurusan Sanitasi Lingkungan Politekkes Kemenkes Yogyakarta Yogyakarta dengan tema “pengaruh ekstrak bawang putih dan lengkuas sebagai pengganti formalin dalam pengawetan tahu pada suhu ruang.	17 Februari 2023
4	[redacted]	[redacted]	informasi terkait dengan profile organisasi, pengawasan kosmetika secara daring, kerja sama dengan marketplace, kebijakan pengawasa kosmetika secara daring	08 Mei 2023
5	[redacted]	[redacted]	informasi kegiatan KIE Obat dan Makanan oleh BB POM di Yogyakarta, profile BB POM di Yogyakarta, dokumentasi kegiatan KIE dan gedung BB POM di Yogyakarta, peliputan kegiatan Fasilitasi Desa pangan aman di Desa Trumulyo. seain itu diberikan dokumen berupa laporan tahunan, laporan interim, dan Renstra, serta regulasi terkait TUPOKSI BPOM	17 Mei 2023
6	[redacted]	[redacted]	informasi dan data kaitan dengan tugas akhir "Perlindungan konsumen terhadap kosmetika impor yang belum brizin edar yang diperdagangkan secara bebas di paltform e commerce	09 Juni 2023
7	[redacted]	[redacted]	Bahan untuk penulisan skripsi terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Snack Repacking Melalui Online	4 JULI 2023
8	[redacted]	[redacted]	informasi tupoksi BPOM dan BB POM di Yogyakarta, hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan, pemberdayaan masyarakat serta regulasi terkait dengan nitrogen cair	28 September 2023
9	[redacted]	[redacted]	informasi kaitan TUPOKSI BPOM dan BBPOM di Yogyakarta, renstra, laporan tahunan dan interim, data pengawasan	8 September 2023
10	[redacted]	[redacted]	data dan informasi terkait pengawasan Minol	5 Desember 2023

BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada tahun 2023, terkait dengan permohonan informasi dapat disimpulkan bahwa semua permohonan Informasi dapat diselesaikan(100% pada tahun 2023. Terkait saran pada laporan PPID tri wulan III tahun 2023, Tim PPID telah melakukan up dating data terkait dengan regulasi PPID, dan informasi layanan public. Namun terdapat beberapa dokumen informasi berkala yang belum dapat dilakukan up dating mengingat penyusunan dokumen tersebut masih menunggu data hasil audit dari pihak internal dan eksternal. Dokuman tersebut akan diperbarui pada tri wulan III Tahun 2023. Up dating dokumen berupa informasi secara berkala, serta merta dan informasi publik setiap saat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Regulasi KIP termasuk Keputusan Kepala BBPOM di Yogyakarta tentang Pembentukan PPID BBPOM di Yogyakarta;
2. Dokumen terkait dengan Keputusan Kepala BBPOM di Yogyakarta tentang Petugas Layanan Publik Tahun 2023; Standar Pelayanan Publik tahun 2023 dan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta tentang Petugas Tamu Berkebutuhan Khusus, serta buku standar pelayanan publik BB POM di Yogyakarta Tahun 2023.
3. Laporan layanan dan pengaduan bulan Oktober, November, dan Desember Tahun 2023
4. klarifikasi, siaran pers, dan pengadaan barang jasa;
5. Laporan interim TW III Tahun 2023
6. Publikasi indeks kepuasan masyarakat di Yogyakarta dan laporan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui media sosial BB POM;
7. Publikasi informasi harian terkait pengawasan Obat dan Makanan dan siaran pers/peringatan publik Obat dan Makanan melalui website BB POM di Yogyakart

B. Saran

updating terkait Dokumen informasi publik secara berkala terbaru di Website BB POM di Yogyakarta, dan terus melakukan pemantauan terhadap informasi publik yang dimuat di website BB POM di Yogyakarta

BAB IV
PENUTUP

BB POM di Yogyakarta terus berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang prima di masing-masing satuan kerjanya. Untuk itu seluruh personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM harus memiliki pengetahuan dan keseragaman pemahaman terkait implementasi keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pelayanan informasi publik sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan informasi publik sebagai wujud *good governance* terus dilaksanakan oleh BB POM di Yogyakarta sebagaimana mestinya, sehingga perjalanan demokrasi sebagai amanat reformasi dapat terealisasi. Keterbukaan infromasi ini merupakan jawaban adanya perlindungan hukum terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sebagai pengguna kebijakan publik.

Yogyakarta, 30 Desember 2023
Kepala BBPOM di Yogyakarta,



Bagus Heri Purnomo, S.Si., Apt.